Mutia Zakia Salma – 071012098

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Sister City partnership is not a new thing in contemporer international relations. By the goes of times civil society also became a leading actor, their contribution can be seen as people-to-people diplomacy which is actually the main mission of this partnership. For the implementation in Indonesia commonly, they have not engaged already. This researchs examining whether the civil society exsistency gives the positive implication to the efectivity and the development of the partnership, regarding the terms and conditions in MoU. To analize this, the clasification based on the 5th years of partnership called a periode of parternship. In each periode, it analized how do the involvement of SSSCA can influence the efectivity and the development that mentioned before.

Key Words: Sister City, Civil Society, Surabaya, Seatlle

Kerjasama sister city memang bukan merupakan hal baru lagi dalam hubungan internasional kontemporer. Namun seiring berjalannya waktu, muncul pula aktor lain dalam jajaran kontributor kerjasama sister city yang turut memberikan peran bagi berbagai kegaitan implementasi dan sumbangsih terhadap perkembangan selain keberadaan dari pemerintah kota itu sendiri, mereka adalah masyarakat sipil. Penelitian ini mengkaji mengenai apakah keberapdaan asosiasi masyarakat sipil seperti ini berimplikasi positif terhadap kerjasama sister city di Indonesia. Dalam penelitian ini indikator implikasi positif yang digunakan adalah mengenai efektifitas perkembangan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam MoU. Untuk menganalisis hal tersebut, dilakukan klasifikasi berdasarkan periode kerjasama, yakni tiap 5 tahun perpanjangan kerjasama. Pada tiap periode dianalisis bagaimana keterlibatan peran SSSCA dalam implementasi kerjasama sister city dan bagaimana kaitannya dengan efektifitas dan perkembangan kerjasama yang telah disebutkan sebelumnya.

Kata Kunci: Sister city, Masyarakat Sipil, Surabaya, Seattle

Sebagai sebuah kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya menjadi salah satu kota yang secara cukup signifikan memegang peranan interkoneksi negara ini jika dilihat dari entitas *sub-state*. Dalam berbagai bidang, salahsatunya ekonomi yang menjadi motor, Surabaya merupakan pelabuhan dagang sejak jaman kolonial bahkan kerajaan nusantara kuno. Perkembangan ekonomi yang seiring dengan berkembangnya pula ilmu pengetahuan dan teknologi membuat Surabaya menjadi pintu masuk bagi investor dalam dan luar negeri yang ditunjang dengan dibangunnya berbagai infrastruktur dan sistem transportasi laut dan udara yang terhubung dengan banyak kota di dunia. Mengenai hubungan dengan kota lain di luar negeri, Surabaya dapat dikatakan menjadi salah satu yang cukup aktif di Indonesia. Melalui sebuah payung kerjasama bilateral antar kota yang disebut dengan *sister city*, Surabaya merupakan salah satu pioner di Indonesia selain Kota Bandung di Jawa Barat.

Kerjasama sister city merupakan sebuah kerjasama yang berkembang dari adanya spirit globalisasi yang mana seluruh aktor dapat terlibat dalam konstelasi hubungan internasional. Secara global, isu mengenai otonomi daerah banyak mengemuka di negara-negara utamanya menyangkut persoalan penyebaran kekuasaan (dispersion of power) sebagai manifestasi riil dari demokrasi. Dengan kta lain, otonomi daerah sebagai manifestasi demokrasi pada hakekatnya merupakan penerapan konsep areal devision of power yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu negara, sehingga menimbulkan adanya kewenangan penyelenggaraann pemerintahan di satu sisi oleh Pemerintahan Pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak hanya aktor negara saja yang terlegitimasi, namun juga aktor sub-state, supra-state, ataupun nonstate dapat pula memiliki peran penting jika mengacu pada kebutuhan akan perkembangan global. Eksistensi kerjasama sister city yang semakin berkembang, juga turut dipengaruhi oleh perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di berbagai negara.

Kerjasama sister city merupakan bentuk kerjasama yang fleksibel terutama dalam hal bidang yang dikerjasamakan. Hal ini tergantung dari kebutuhan dan preferensi masing-masing kota untuk bermitra. Fleksibilitas tersebut bertujuan untuk menciptakan output dan outcome kerjasama yang dinilai produktif dan konstruktif. Produktif dalam hal ini berarti memberikan kebermanfaatan bagi kedua belah pihak. Sederhananya, jika salah satu sektor kerjasama dinilai mengalami kemunduran, maka bukan berarti kerjasama selesai. Namun konsentrasi kerjasama dapat beralih pada sektor lain yang lebih strategis dan memiliki nilai keunggulan komparatif tertentu. Kuncinya, selama masih

ada kepentingan diantara kedua pihak, maka kerjasama masih dapat terus dipertahankan. Dengan demikian, hubungan kerjasama Sister city tidak sebatas terjadi antara sesama negara maju dan negara maju (simetris), tetapi juga antara negara maju dan negara berkembang (asimetris). Kerjasama Sister city memiliki karakteristik, yakni (1) merupakan sebuah kesepakatan formal yang dilakukan dengan berdasar sebuah surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh walikota; (2) didasari oleh sebuah niat baik (good intention); (3) model implementasinya tidak hanya satu proyek melainkan beberapa sharing activities, yang mana rencana kerjasama sister city dapat dibentuk melalu pertimbangan rencana pembangunan daerah yang kesimpulannya dapat dilihat dalam bidang/ruang lingkup yang akhirnya diajukan untuk concern implementasi kerjasama.

Prosedur kerjasama sister city yang pada dasarnya tetap memerlukan full mandatory dari pemerintah pusat. Pada awalnya, setelah terjadi penjajagan, maka proposal kerjasama diajukan kepada Departemen dalam negeri untuk kemudian dilakukan penyusunan draft Letter of Intent (LoI) yang kemudian akan disampaikan melalui duta besar negara yang bersangkutan. . Draft LoI yang telah dibentuk kemudian ditandatangani dan diajukan dalam bentuk LoI final oleh pemerintah kota (pemkot) / pemerintah provinsi (pemprov) untuk dimohonkan persetujuan kepada DPRD. Persetujuan dari DPRD ini menjadi syarat untuk pembentukan draft Memorandum of Understanding (MoU) yang akan diproses kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kemudian diteruskan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Ketika draft MOU sudah disetujui, prosedur berikutnya adalah memroses pengajuan mandat *full power* oleh pemprov / pemkot kepada Menteri Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dengan posisi sebagai sekretaris jenderal yang mengirim rekomendasi penerbitan mandat full power tersebut. Ketika mandat *full power* telah diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri, maka dilakukan penandatanganan MOU oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Surat MOU kemudian disimpan oleh Departemen Luar Negeri dan dengan ini kerjasama sister city antara kedua kota sudah dapat mulai dilaksanakan.

Seattle merupakan sebuah kota di Amerika Serikat yang menjadi kota rekan kerjasama sister city Surabaya yang pertama kali. Dengan penandatangan memorandum of understanding (MoU) tertanggal 27 September 1992 antara walikota Seattle, Norman B. Rice dengan walikotamadya Surabaya H. Poernomo Kasidi, dibentuklah kesepakatan kerjasama dalam berbagai bidang dengan berbagai ketentuan. Ada sesuatu yang unik dari kerjasama sister city kedua kota mengenai aktor-aktor yang terlibat. Masyarakat sipil yang dalam hal ini berbentuk asossiasi dan berasal dari pihal Seattle merupakan salah satu wujud

implementasi people-to-people diplomacy yang pada awalnya merupakan tujuan awal kerjasama ini diinisiasi. Platform diplomasi yang mulai digagas sekitar tahun 1950-an oleh mantan presiden Amerika Serikat, Eishenhower ini mulai marak di Indonesia sekitar akhir tahun 1980-an. Namun bagaimanapun, terdapat perbedaaan karakteristik implementasi dari dua kota berbeda negara yang melaksanakan kerjasama sister city ini. Mempertimbangkan waktu kerjasama yang sudah berlangsung cukup lama, penelitian ini mengambil sisi problematis dari keberadaan entitas masyarakat sipil dalam kerjasama antara Kota Surabaya dan Kota Seattle dan pengaruhnya terhadap efektivitas dan perkembangan kerjasama yang akan dianalisis melalui dinamikanya dalam lingkup per lima tahun (satu periode) implementasi kerjasama.

Secara konsep, William N. Dunn, seorang analis kebijakan publik dari Pittsburg University menjelaskan bahwa efektivitas dari implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari apakah program kerjasama yang diagendakan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dan memperoleh hasil yang diinginkan. Secara kontekstual, efektivitas dilihat dari bagaimana tujuan kerjasama sekaligus agenda-agenda strategis untuk mencapai tujuan tersebut dapat terlaksana dalam proses keriasama. Pun dengan dinamika yang ada, konsistensi niatan kerjasama dapat dilihat dari bagaimana kerjasama tersebut dapat tetap diagendakan. Secara operasional, hal ini dapat dilihat melalui kesesuaian implementasi kegiatan dengan MoU yang merupakan draft menvatakan tuiuan diberlakukannya kerjasama tersebut. Sedangkan perkembangan sister city, Pendapat mengenai perkembangan sister city digagas oleh O'Toole (2005) vang mengidentifikasikan perkembangan tersebut dalam tiga level. ketiga level tersebut adalah accociative, reciprocative dan commercial approach. Tahap perkembangan pertama, yakni accociative, mengacu pada pendorong international friendship, culture exchage, dan international awareness. Sedangkan tahap kedua, yakni reciprocative, mengacu pada peningkatan aktivitas pertukaran di bidang pendidikan. Sedangkan pada level commercial approach, kerjasama menjadi berekspansi ke ranah pertumbuhan ekonomi dengan mekanisme pasar yang saling *engaged* dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi lokal.

Kerjasama Sister City di Indonesia dan Amerika Serikat

Di Indonesia, kewenangan untuk melakukan otonomi daerah termasuk kebebasan untuk melakukan hubungan internasional tercermin dalam Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, di

antaranya UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 09/A/KP/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dan Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Hal inilah yang menjadi wadah hukum bagi entitas kota untuk saling berinteraksi sekcara global. Perundangan lain vakni Undang-undang no. 20 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mengatur mengenai mekanisme lembaga negara atau lembaga pemerintah, departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional. Sebelum rencana dilaksanakan, terlebih dahulu harus berkonsultasi mengenai rencana tersebut dengan Meteri Luar Negeri. Konsultasi tersebut adalah mengenai latar belakang permasalahan urgensitas kerjasama, analisis masalah ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang memengaruhi kepentingan nasional indonesia dan posisi Indonesia.

Kerjasama internasional oleh aktor subnegara dalam bentuk sister province dan sister city telah semakin berkembang sejak tahun 1980-an. Tercatat pada 2004, kurang lebih terdapat 100 kerjasama internasional dalam bentuk sisterhood yang telah terdaftar di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam catatan lain disebutkan bahwa sedikitnya ada 13 pekmot yang telah membangun kerjasama internasional melalui mekanisme sister city, yakni Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Palembang, Sangihe, Denpasar, Makassar, Solo, dan Padang. Namun, dari catatan kementerian tersebut, tidak sampai 15% dari kerjasama sister city yang tetap berjalan dengan baik, tidak sampai 20% lainnya berjalan dengan seadanya, dan sisanya hampir 65% dapat dikatakan hampir tidak melakukan kegiatan sama sekali. Hal ini umumnya disebabkan oleh kegagalan pengelolaan, yakni kurangnya kemampuan kelembagaan daerah dalam mengelola, kurangnya komitmen secara berkelanjutan, kurangnya dukungan dana secara efisien, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Dalam hal ini sepertinya tidak hanya sosialisasi terhadap masyarakat yang diperlukan, namun terlebih lagi ajakan atau wadah untuk bergabung (engage) di dalamnya.

Di Pemerintah Daerah di Indonesia, termasuk yang diterapkan di Surabaya, berlaku alur koordinasi implementasi seperti diagram di bawah ini:

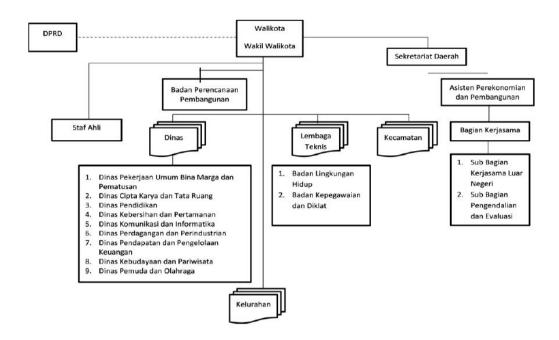


Diagram 1. Alur Koordinasi dalam Penerapan Kerjasama Sister City di Indonesia (Sumber: Rahmat. 2004, "Evaluasi Keberhasilan Kerjasama Antar Kota 'Sister City' Kota Surabaya". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK*)

Di Amerika Serikat, *Sister city* dikelola dalam suatu wadah organisasi nonpartisan dan nonprofit yang dinamakan Sister Cities International. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memajukan perdamaian dan kesejahteraan melalui pertukaran pembangunan kultural, edukasi, kemanusiaan, dan ekonomi. Terlebih lagi dalam situs, <u>sister-cities.org</u>, disebutkan pula fungsinya *serves as a hub for intitutional knowledge* and best pratices in the field of citizen diplomacy.

Selain itu, dalam kerjasama sister city di Amerika Serikat, terdapat pula entitas yang lain, yang disebut Sister city Organization, yang didefinisikan sebagai kelompok sukarela yang terdiri dari masyarakat pada umumnya dengan dukungan dari pemerintah lokal yang terpilih (secara politik), dan merupakan bentuk hubungan jangka panjang dengan masyarakat dan organisasi di kota lain di luar negeri. Masing-masing kota dalam kerjasama sister city merupakan entitas yang independen dan mengikuti aktivitas dan area tematik yang penting bagi mereka, termasuk dalam hal ini pertukaran dalam hal municipal, bisnis, budaya, pendidikan, dll.

Konsep sister city di Amerika Serikat dapat dikatakan memiliki karakter yang berbeda dengan konsep sister city di Indonesia. Jika di Amerika Serikat lebih menekankan pada people-to-people vang artinya lebih menitikberatkan peranan individu seperti guru, insinyur, pengusaha, akuntan, dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia lebih menekankan pada peranan pemerintah. Pada umumnya pemerintah kota yang memiliki peranan penting untuk menginplementasikan program kerjasama sister city. Kerjasama sister city a la Indonesia juga di dorong oleh adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberikan wewenang desentralisasi dan otonomi daerah melalui undang-undang vang mengatur tentang hubungan luar negeri dan otonomi daerah. Melalui undangan tersebut maka daerah dapat menentukan dan menyusun sendiri program pembangunannya, selain itu juga memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengadakan hubungan luar negeri, yang merupakan upaya Indonesia untuk menyesuaikan diri dan memanfaatkan globalisasi secara maksimal.

Peran Masyarakat Sipil dalam agenda Global: Entitas SSSCA dalam Kerjasama Sister City Surabaya – Seattle

Pada awal era modern, masyarakat sipil dimaknai sebagai penduduk yang terikat pada kontrak sosial yang dibuatnya sendiri dan diatur oleh hukum negara didasarkan pada prinsip persamaan. Masyarakat sipil yang dalam hal ini juga dapat pula disebut sebagai Masyarakat Sipil Global dalam keilmuan Hubungan Internasional ini, memiliki keterikatan dengan berbagai institusi yang muncul secara universal. Hal inipun menjadi masif seiring dengan hadir dan berkembangnya globalisasi, terutama revolusi informasi yang memungkinkan manusia terhubung dan beraktivitas melintasi batas-batas politis negara, termasuk didalamnya bermigrasi, berkomunikasi, atau bahkan melakukan perdagangan dengan lebih besar dengan peluang pilihan dan tantangan resiko yang lebih tinggi namun diiringi dengan peningkatan efisiensi ekonomi.

Mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh Masyarakat Sipil dalam agenda-agena global, Wilde berpendapat untuk merujuk pada tujuan dari MSG, yaitu memberikan suatu kontribusi yang dapat membantu negara supaya menjadi lebih progresif dalam nilai-nilai yang baik, seperti halnya demokrasi, transparansi, dan nilai-nilai keterbukaan lain, di mana posisi MSG adalah penengah diantara kepentingan negara dan masyarakat.

Dalam keriasama sister citu, kewenangan diberikan kepada semua aktor dalam masyarakat untuk berperan serta dalam arena global ini. Hal ini untuk mendorong diplomasi pada tingkatan masyarakat. Sehingga melalui hal ini muncul produk-produk keriasama antara pemerintah dan maysarakat. Dalam konteks kerjasama sister sity antara Surabaya dan Seatlle, terdapat asosisasi masyarakat sipil dari pihak Seattle bernama Seattle-Suabaya Sister city Association (SSSCA). Didirikan pada 29 September 1992 setelah tumbuhnya ketertarikan dari masyarakat kedua kota (Seattle dan Surabaya) untuk belajar lebih dalam tentang satu sama lain, SSSCA memiliki peran dalam membangun persahabatan, kebersamaan, dan relasi yang terkoneksi antara Seattle (Amerika Serikat) dan Surabaya (Indonesia) dalam hal promosi pemahaman budaya, pendidikan, bisnis, perdagangan dan pariwisata. Selain untuk mengangkat kesadaran terhadap isu-isu global. menyerukan partisipasi yang lebih besar dalam dialog dan pertukaran internasional, yang mana sejalan pula dangan membangun dan memerkuat jembatan pemahaman mutualistik dan rasa saling menghormati. Value yang dibawa oleh SSSCA senada dengan ungkapan Nelson Mandela dalam suatu kesempatan di Majelis Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa "the reality can no longer be ignored that we live in an interdependent world which is bound together to a common destiny. People-to-people relationships not only enhance our lives, but represent our best hope for peace and prosperity in the future.".

Seattle - Surabaya Sister City Association (SSSCA) juga meruapkan sebuah organisasi non-profit di bawah administrasi Walikota Seattle dan Walikota Surabaya, yang memiliki agenda rutin setiap dua bulan sekali bersama presiden dari 21 asosiasi sister city kota lainnya untuk mengagendakan rapat membahas kegiatan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan kerjasama sister city dengan masing-masing kota mitra kerjasama. Karena merupakan sebuah badan non-profit dan pada dasarnya non-government, tidak ada alokasi budgeting dari pemerintah. Pendanaan kegiatan sebagian berasal dari reimbursement terbatas dari Walikota Seattle, uang kas dari anggota, dan sumbangan masyarakat apabila mengadakan kegiatan sosial. SSSCA memiliki 35 anggota yang semuanya berdomisili di Seattle dan tidak ada satupun yang ada di Surabaya. Untuk mengadakan kegiatan, SSSCA sangat tergantung terhadap partisipasi (baik dana maupun tenaga) anggota-anggotanya dan masyarakat Indonesia yang ada di Seattle, serta pihak-pihak lain yang mau bekerjasama dengan SSSCA. Namun, SSSCA sangat diuntungkan dengan adanya koneksi dari anggota-anggota SSSCA kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Seattle seperti Boeing dan Starbuck, yang kemudian sangat membantu dalam fasilitasi kegaiatan.

Implementasi Kegiatan dan Keterlibatan SSSCA pada Setiap Periode Lima Tahun Kerjasama

Dijelaskan dalam naskah MoU sister city pasal 6 ayat a mengenai masa berlaku kerjasama dan ketentuan pemutusan kerjasama, , terdapat kesepakatan untuk selalu memperpanjang kontrak kerjasama berdasarkan kesepakatan per 5 tahun, apabila kerjasama masih dianggap perlu dan tidak ada salah satu pihak yang berinisiatif untuk memutuskan kerjasama. Dalam penelitian ini, untuk melihat mengenai keterlibatan aktor-aktor dalam dinamika implementasinya, pembahasan dibagi menurut periode setiap lima tahun, seperti diagram di bawah ini:



Diagram 2. Pembagian periode tahun kerjasama

Dalam periode pertama, kegiatan hampir merata di bidang budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta ekonomi dan bisnis salah berfokus pendidikan kedokteran/kesehatan satunva pada infrastruktur kota. Selain itu, lima tahun pertama ini telah berhasil melakukan kerjasama lanjutan secara signifikan. penandatanganan MoU kerjasama pelabuhan dalam payung sister port antara Seattle Port dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam periode ini, SSSCA banyak sekali berkontribusi, baik dalam wujud inisiasi program, peninjauan dan penelitian, maupun semisal bantuan pengakomodasian. Sebagai masyarakat sipil, SSSCA cukup berperan signifikan pula dalam bidang kesenian dan kebudayaan, pengembangan dunia usaha, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sedikit mengenai manajemen perkotaan. Sementara itu, bidang seperti perlindungan lingkungan hidup terlebih lagi mengenai menejemen pelabuhan, lebih banyak diperankan oleh pemerintah kota. Namun adalah suatu persolan lain apabila melihat dinamika kerjasama, vakni intensitas kerjasama cenderung lebih ideal terimplementasi pada periode awal dalam artian bidang pelaksanaannya kerjasama terimplementasikan secara merata. Dalam periode kedua, tercatat hanya ada dua kegiatan, yakni di bidang pendidikan dan pengembangan sektor kebijakan menajemen perkotaaan di Seattle. Hal ini dikarenakan Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang berimbas secara multidimensional, salah satu diantaranya adalah concern atau perhatian

terhadap kerjasama bilateral antar kota antar negara ini. Secara langsungpun, jatuhnya nilai Rupiah membuat kegiatan kerjasama menjadi sangat boros anggaran, terutama di masa-masa krisis tersebut. Dalam periode kedua ini, kegiatan kerjasama yang turut melibatkan SSSCA merupakan kegiatan manajerial kerjasama oleh pemerintah yang bersifat associative.

Periode lima tahun berikutnya adalah periode reaktivasi setelah sempat dapat dikatakan vakum selama sekitar 10 tahun bertepatan dengan krisis multidimensional di Indonesia yang begitu juga terjadi di kawasan Asia. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini cenderung bersifat untuk merekatkan lagi hubungan baik yang sempat terjalin sejak tahun 1990an. Kegiatan solidaritas juga digelar terkait dengan adanya bencana Tsunami Aceh dan Gempa Djogja di Indonesia. Pada akhir periode lima tahun ketiga ini, diadakan pula forum pembahasan intensif mengenai keberlanjutan kerjasama termasuk tentang agenda-agenda kerjasama pada tahun berikutnya. Dalam hal ini, SSSCA turut berpartisipasi aktif terhadap setiap kegiatannya.

Dalam periode keempat, program kerjasama dapat dikatakan hanya sebatas interaksi, terutama menyangkut mengenai perumusan kebijakan kerjasama, baik itu soal ketindaklanjutan atau perpanjangan komitmen kerjasama maupun mengenai penjajakan isu-isu potensial yang sekiranya dapat diagendakan di tahun berikutnyaMeskipun penjajakan sebelumnya belum ter-follow up secara maksimal, dalam periode ini terlihat kedua pihak memiliki niatan untuk meneruskan dan mereaktivasi kerjasama. Hal ini terbutki dari dimulainya penjajakan oleh Konsulat Jenderal RI untuk San Fransisco mengenai kemungkinan kerjasama di bidang bisnis. SSSCA dalam hal ini juga mulai kembali aktif mengadakan acara-acara seperti konser inagurasi kebudayaan Indonesia yang semakin banyak di Seattle. Kegiatan pada periode ini didominasi oleh kegiatan-kegiatan associative dalam bidang seni dan budaya. Kerjasama kemudian resmi dilanjutkan ketika keduanya berkorespondeksi lewat surat elektronik pada tahun 2012.

Dalam periode paska perpanjangan kerjasama tahun 2012 (periode kelima), kerjasama sister city yang melibatkan SSSCA cenderung seputar seni dan budaya. Setelah berjalannya waktu kerjasama yang telah dijalani, yakni sekitar kurang lebih 22 tahun, terdapat berbagai hambatan utamanya terkait dengan alasan geografis dan ekonomis. Hal ini membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat associative menjadi sangat ditekankan.

Analisis Peran SSSCA dalam Efektivitas dan Perkembangan Kerjasama Surabaya – Seattle

Efektivitas kerjasama *sister city* diukur dari kesesuaian kegiatan terhadap bidang kerjasama yang telah disepakati dalam MoU. Berikut adalah tabel analisis tersebut:

	Period	Efektivitas
	e	(Implementasi sesuai dengan tujuan)
Peran SSSCA	I	Dalam periode pertama, terdapat 25 kegiatan d mana 13 di antaranya melibatkan kontribus SSSCA. Bidang dari kegiatan-kegiatan tersebu adalah kesenian dan kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekonomi.
	II	Terdapat dua kegiatan pada periode yang relativakum ini. Salah satu kegiatan melibatkan SSSCA untuk berkontribusi, yakni dalam Asia Pasific Cities Summit, di Kota Seattle. Hal ini merupakar wujud kegiatan non bidang namun bersifa associative yang penting untuk keberlangsungar kerjasama.
	III	Periode ketiga dapat dikatakan merupakan periode "pemulihan kondisi". Dalam periode ketiga tercatat 5 kegiatan dengan 3 kegiatan yang melibatkan SSSCA. Ketiganya ada pada bidang seni dan budaya.
	IV	Tercatat 21 kegiatan kerjasama dengan 20 kegiatar melibatkan SSSCA, yakni mengenai kesenian dar kebudayaan, serta pendidikan dan hubungar bilateral kedua kota.
	V	Dalam kurun waktu antara tahun 2013 hingga sekitar Agustus 2014 tercatat 10 kegiatan yang kesemuanya melibatkan SSSCA, yakni dalam bidang kesenian dan kebudayaan.

Tabel 1. Kegiatan Kerjasama Sister city Kota Surabaya – Seatlle pada periode paska tahun 2012.

Melaui analisis tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa peran SSSCA sebagai masyarakat sipil cukup signifikan dalam bidang kesenian dan kebudayaan, pengembangan dunia usaha, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sedikit mengenai manajemen perkotaan. Sementara itu, bidang seperti perlindungan lingkungan hidup terlebih lagi mengenai menejemen pelabuhan, lebih banyak diperankan oleh pemerintah kota. Namun adalah suatu persolan lain apabila melihat dinamika kerjasama, yakni intensitas kerjasama cenderung lebih ideal terimplementasi pada periode awal

pelaksanaannya dalam artian bidang kerjasama lebih terimplementasikan secara merata.

Mengenai pengaruhnya terhadap perkembangan kerjasama, merujuk pada tingkat perkembangan *accociative*, kemudian berkembang kearah *resiprocative*, dan selanjutnya pada tingkatan yang paling tinggi adalah *commercial approach*. Berikut adalah tabel analisis kegiatan terhadap perkembangan kerjasama:

	Period	Perkembangan
	e	(a. Associative, b. Resiprocative, c. Comercial
		Approach)
Peran SSSCA	I	Dalam periode pertama, terdapat 13
		implementasi kegiatan, yang mana SSSCA
		terlibat di dalamnya dalam tingkatan associative
		resiprocative, dan commercial approach.
	II	Dalam periode kedua, yang cenderung
		merupakan masa vakum, terdapa 2 implementasi
		kegiatan, yang mana SSSCA terlibat di dalamnya
		dalam tingkatan associative.
	III	Dalam periode ketiga, terdapat 5 implementas
		kegiatan, yang mana SSSCA terlibat di dalamnya
		dalam tingkatan associative dan resiprocative.
	IV	Dalam periode keempat, Tercatat 21 kegiatan
		kerjasama dengan 20 kegiatan melibatkan
		SSSCA, seputar kegiatan yang bersifat
		associative, resiprocative, dan commercial
		approach.
	V	Dalam periode kelima, kurun waktu antara tahun
		2013 hingga sekitar Agustus 2014 tercatat 10
		kegiatan yang kesemuanya melibatkan SSSCA
		dalam kegiatan yang bersifat associative dan
		resiprocative.

Tabel 2. Analisis Implementasi Kegiatan Kerjasama Sister city Kota Surabaya – Seatlle terhadap Perkembangan Sister city.

Perkembangan kerjasama sister city mengacu tingkat pada perkembangan accociative. kemudian berkembang kearah resiprocative, dan selanjutnya pada tingkatan yang paling tinggi adalah commercial approach. Dalam tingkatan accosiative. berorientasi pada pendekatan hubungan antar kedua kota, yakni untuk mendorong international friendship, culture exchage, dan international awareness. Dalam tingkatan resiprocative, hubungan kerjasama mulai berbentuk hubungan timbal balik, salah satunya mengacu pada peningkatan aktivitas pertukaran di bidang pendidikan. Sedangkan

dalam tingkatan *commercial approach*, kegiatan mengarah pada kesepakatan-kesepakatan kebijakan yang mana dimaksudkan mengarah kepada pendekatan komersial yang saling *engage* dengan kebutuhkan lokal.

Melaui analisis tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa peran SSSCA sebagai masyarakat sipil cukup signifikan dalam implementasi kegiatan kerjasama yang bersifat associative, resiprocative, dan bahkan commercial approach. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran atau peran masyarakat sipil dalam kerjasama sister city pada dasarnya dapat menunjang perkembangan kerjasama itu sendiri. Namun adalah suatu persolan lain apabila melihat dinamika kerjasama, yakni intensitas kerjasama cenderung lebih ideal terimplementasi karena mencakup kegiatan dengan sifat kerjasama yang lebih mendalam pada periode awal pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

Booklet Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya.

Naskah Perjanjian Kerjasama Antara Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia dan Kota Seattle Negara Bagian Washington Amerika Serikat. 1992.

Buku, E-Book, dan Media Cetak

- Barnett, Micheal & Kathryn Sikkink. 2008. "From International Relations to Global Society" dalam Reus-Smith, Christian & Duncan Snidal (ed.) The Oxford Handbook of International Relations, Oxford University Press, hlm. 62-83.
- Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. 2001, hlm. 292-3.
- Florini, Ann & P.J. Simmons. 2000. "What the World Needs Now?" dalam The Third Force of Transnational Civil Society. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, hlm. 3-4.
- Jackson, Robert & George Sorensen. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional (terj. Dadan Suryadipura, Introduction to International Relations). Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi.
- Leni Wild. 2006. Strengthening Global Civil Society. London: Institute for Public Policy Research, hlm. 30-32.
- Mas'oed, Mohtar. 1991. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 93.
- Savir. 2003. dalam Rogier van der Pluijm, 'City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics, Clingendeal: CIP-Data Koni Bilbiotheek, Netherlands Intitute of International Relations. 2007.
- Yunus, Moch. 2012. From Mates to Market, Strategi Kerjasama Sister city. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.

Jurnal dan Artikel

- Bell-Sounder, Donald & Shanna Bradel. 2005. A Study of Sister city Relations.
- Blank et al. 2006. dalam Rogier Van Der Pluijm dan Jan Melissen. City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics, 2007.
- Cremer, De Bruin, dan Ann Dupuis. n.d. International Sister Cities: Bridging the Local Global Divide, dalam Wiley Online Library diakses pada 4 Mei 2014.
- Dragica Vujadinovic. 2009. Global Civil Society as Concept and Practicein the Processes of Globalization, SYNTHESIS PHILOSOPHICA 47 (1), hlm. 80.
- Forbes. Seattle, WA. [online] dalam http://www.forbes.com/places/wa/seattle/ diakses pada 13 Oktober 2014.
- Jati, Raharjo Warsito. 2012. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. Jurnal Konsitusi, 9 (4).
- Kaldor, Mary. 2003. The Idea of Global Civil Society. International Affairs 79 (3), hlm. 584.
- Karim, Abdul Gafar. 2003. "Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia" dalam Raharjo Warsito Jati. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. Jurnal Konsitusi, 9 (4). 2012.
- New Haven Sister Cities [online] dalam http://nhsistercities.org/page/what-are-sister-cities diakses pada 1 Oktober 2014.
- Salam. 2004. Dalam Gina Puspitasari Rochman & Delik Hudalah. Evaluasi Keberhasilan Kerjasama Antar Kota 'Sister city' Kota Surabaya. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK.

Villiers, J.C. 2009. Success factors and the city-to-city partnership management process – from strategy to alliance capability. Habitat International, 33 (2), hlm. 149-156.

Situs Internet

- Departemen Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal Pusat Adminsistrasi Kerjasama Luar Negeri [online] http://kerjasama.surabaya.go.id/file/PROSEDUR%20KERJASAMA %20SISTER%20CITY.pdf, diakses pada 2 Oktober 2014.
- International, Sister City. 2012. [online] dalam http://www.sister-cities.org/about-sister-cities-international, diakses pada 28 Oktober 2014.
- Pemerintah Kota Surabaya. N.d. Profil kota [online] http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=1 diakses pada 15 September 2014.
- Rumah Bahasa. 2014. [online] dalam www.surabaya.go.id diakses 8 September 2014.
- Seattle Sister Cities. 2014. [online] dalam http://www.seattle.gov/oir/sister-cities diakses pada 17 Oktober 2014.
- The Freater Seattle Datasheet, Office of Intergovernmental Relation City of Seattle. 2014. [online] dalam http://www.seattle.gov/oir/sister-cities/seattles-21-sister-cities diakses pada 16 Oktober 2014.

www. Sister-city.org. 2007.

Skripsi

- Bramantyo, Rio Rakhmat. 2008. Efektifitas Kerjasama Sister city Surabaya dengan Busan dan Surabaya Dengan Kochi dalam Bidang Pendidikan.
- Nurussolihati. 2012. Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerjasama Sister City Sebelum dan Setelah Desentralisasi.
- Putri, Yosanta Perdana. 2008. Fakto-faktor Penghambat Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Melaksanakan Kerjasama Sister city dengan Seattle (1992 2007).

Wawancara

- Soni Ahadian, Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, Personal Interview, 8 Oktober 2014
- Greg Dwidjaya, SSSCA, Personal Interview (via surat elektronik). 10, 22, 29,30 Oktober 2015.